





Integrasi Portal Satu Data Indonesia - SPLP

Oktorialdi, Ph.D. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas



Outline



- ☐ Sekilas Satu Data Indonesia
- ☐ Integrasi Portal Satu Data Indonesia SPLP







Sekilas Satu Data Indonesia



Kebijakan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia





5 Arahan Presiden Perencanaan Transformasi Digital



- Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
- Roadmap transformasi digital di sektor strategis seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran
- 3 Percepatan integrasi Pusat Data Nasional
- 4 Mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital
- Mempersiapkan dengan cepat **regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital**



"Data adalah jenis kekayaan baru Bangsa Kita"

> Ir. H. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia

Sumber: Pidato kenegaraan di DPR (16 Agustus 2019)



Rapat Dewan Pengarah Tahun 2022: Poin Kesepakatan





- 1 Penguatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)
- Penguatan **Kolaborasi Implementasi** Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat Pusat dan Daerah
- Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur TIK Nasional untuk berbagipakai data
- Peningkatan Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kebijakan.

Mendukung Registrasi Sosial Ekonomi bersinergi dengan Satu Data Indonesia

- Peningkatan Peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung Penyelenggaraan SDI di Pemerintahan Daerah dan penetapan NIK sebagai Data Induk (Master Data) guna pemanfaatan data layanan administrasi pemerintah
- Penyusunan dan Implementasi Strategi Baru untuk Pemenuhan SDM Talenta Digital di pemerintahan (data leadership dan digital leadership).



Gotong Royong Data Mencapai Indonesia Emas





Indonesia Emas 2045

Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur



Transformasi Digital Nasional







Mewujudkan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik **(SPBE)** Data Pemerintah Berkualitas dan Terintegrasi (**SDI**)

Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan dan saling mendukung

Birokrasi Efisien dan Akuntabel

Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah Diakses

Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat Sasaran







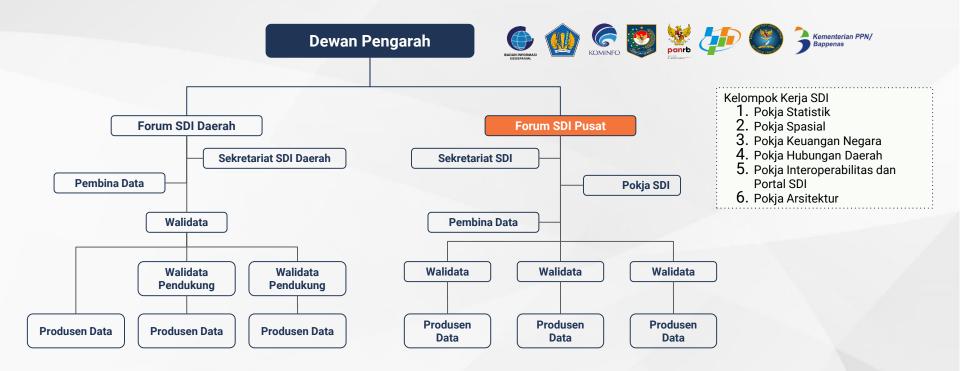
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, SDGs, dan Perlindungan Sosial



Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia





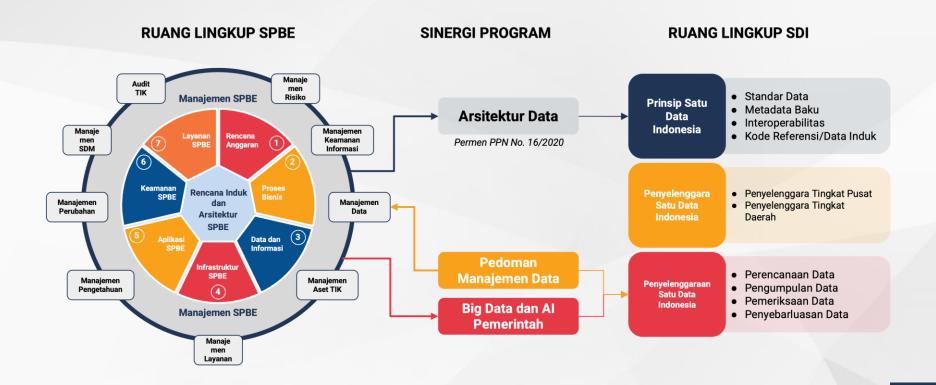




Sinergi SPBE dan SDI: Domain Data dan Informasi









Sinergi Ekosistem Layanan Publik dan Program





SATU DATA INDONESIA

Ekosistem Layanan Publik











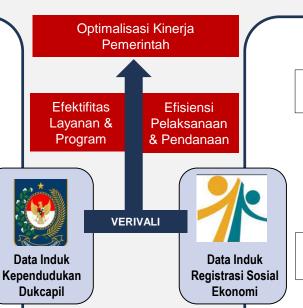


POLRI





..... dan berbagai jenis layanan publik lainnya



Ekosistem Program

PKH, Sembako, ATENSI, Kewirausahaan Sosial



Pemenuhan gizi, Stunting, PBI JK



PIP, KIP Kuliah, Beasiswa Afirmasi, dll



Padat Karya Tunai, Rumah Subsidi, Sanimas, SPAM, RS-Rutilahu. BSPS



Pelatihan Tenaga Kerja Mikro, Ultramikro



.....dan berbagai program lainnya

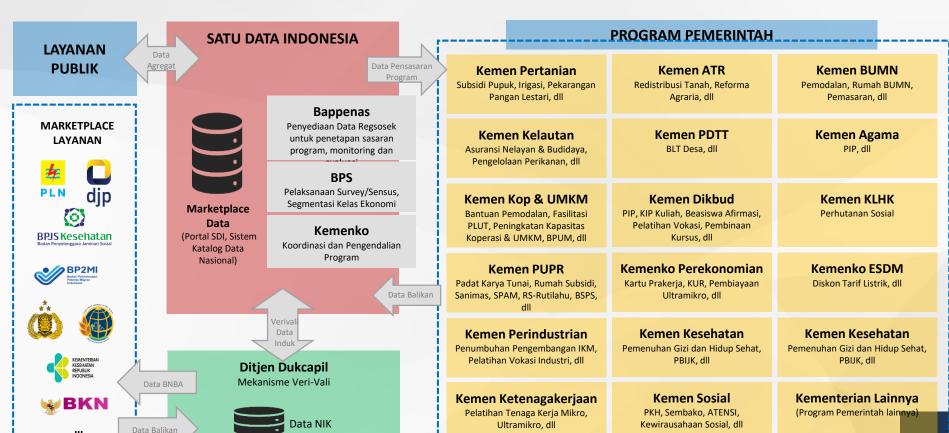


..dll

Tata Kelola Satu Data Indonesia untuk Peningkatan Kualitas Program dan Layanan







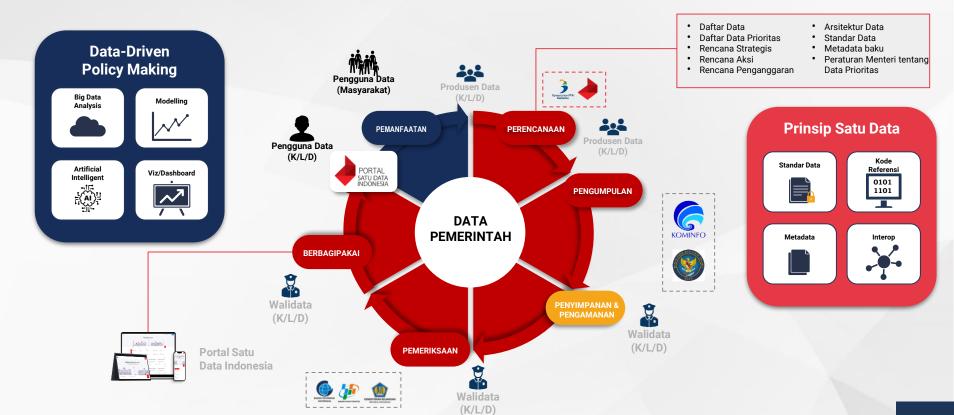


Tata Kelola Satu Data Indonesia

Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah





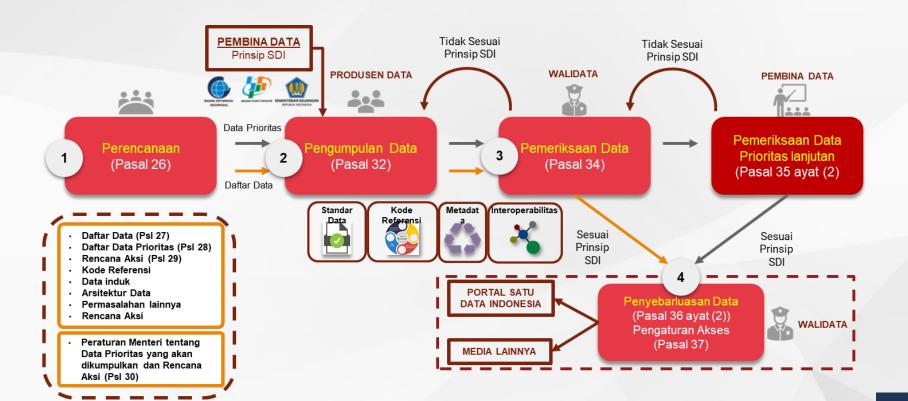




Konsolidasi Penyelenggara Satu Data Indonesia



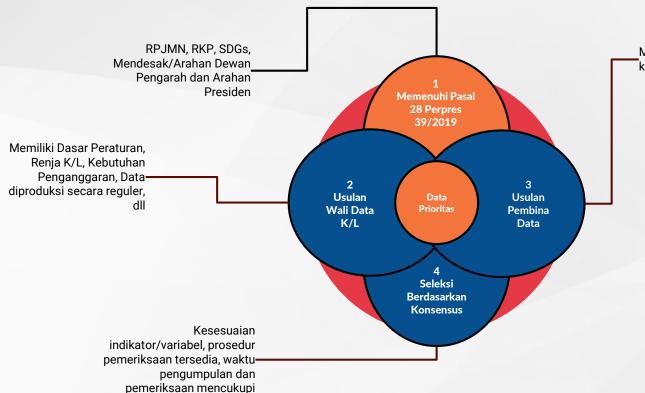












Memiliki Dasar Peraturan, kebutuhan spesifik, dll.

Catatan:

- List Data Prioritas bukan hanya data yang telah dimiliki/ diproduksi, tapi termasuk yang akan dikumpulkan di tahun berjalan dan yang dibutuhkan, baik yang diproduksi sendiri atau dari instansi pusat lain.
- K/L akan diminta untuk menerapkan Standar Data dan Metadata Baku sesuai arahan Pembina Data, dan didefinisikan dalam proses Perencanaan Data Prioritas.
- 3. SDI telah mensosialisasikan Rencana Aksi untuk K/L, termasuk didalamnya terkait Pengumpulan Data Prioritas dalam Katalog Data

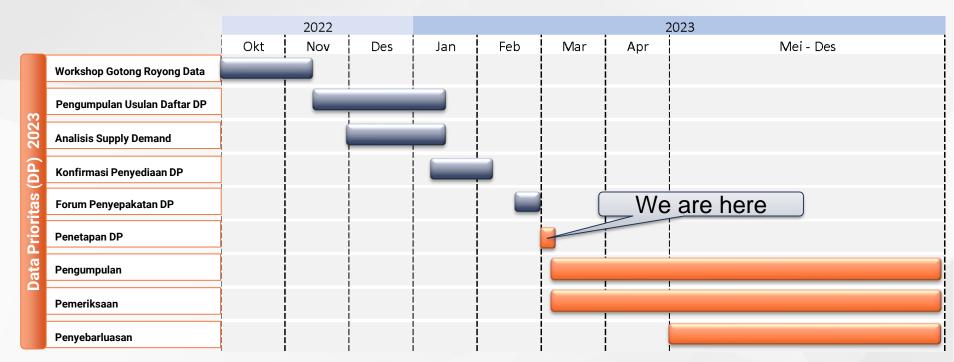




Timeline Pengelolaan Data Prioritas 2023 Tingkat Pusat







Catatan:

- 1. Workshop Gotong Royong Data adalah serial meeting untuk menginventarisir kebutuhan data seluruhan K/L untuk dijadikan data prioritas
- 2. Forum dilaksanakan pada Minggu ke-4 Bulan Februari mengingat banyaknya usulan DP 2023 yang perlu diperiksa





Penyepakatan Data Prioritas 2023





| | Usulan dari K/L lain | | | Usulan Internal | | | | Grand Total |
|--|-----------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| Dasar Rujukan | Belum dikonfirmasi | Bukan Tupoksi/Tidak Tersedia | Tersedia | Tersedia dengan Catatan | Bukan Tupoksi/Tidak Tersedia | Tersedia | Tersedia dengan Catatan | |
| 1. RPJMN/RKP | 509 | 485 | 449 | 148 | 30 | 196 | 16 | 1833 |
| 2. SDGs | 5 | 21 | 34 | 4 | 2 | 70 | 7 | 143 |
| 3. Kebutuhan Mendesak | 152 | 90 | 79 | 33 | 13 | 199 | 7 | 573 |
| 4. RPJMN/RKP SDGs | 18 | 17 | 20 | 1 | 1 | 7 | | 64 |
| 5. SDGs Kebutuhan Mendesak | 2 | | | | | | | 2 |
| 6. RPJMN/RKP Kebutuhan Mendesak | 8 | 5 | 5 | | | 3 | | 21 |
| 7. RPJMN/RKP SDGs Kebutuhan Mendesak | | | | | | 7 | | 7 |
| 8. Lainnya | 50 | 23 | 54 | 5 | 14 | 250 | 10 | 406 |
| 9. None | 438 | 448 | 241 | 65 | 6 | 96 | 18 | 1312 |
| Grand Total | 1182 | 1089 | 882 | 256 | 66 | 828 | 58 | 4361 |

Ditetapkan sebagai DP 2023 Diusulkan menjadi DP 2024 karena menyesuaikan dengan anggaran tahun depan Tidak ditetapkan sebagai DP 2023

Usulan Data Prioritas Tahun 2023 yang akan ditetapkan sebagai Data Prioritas Tahun 2023 adalah

- Usulan dari K/L lain yang belum dikonfirmasi namun dasar rujukannya kuat (RPJMN/RKP, SDGs, Kebutuhan Mendesak)
- Usulan dari K/L lain yang sudah terkonfirmasi ketersediaannya.
- Usulan Internal.

Dengan total sebanyak 2404 Data.



Penyepakatan Data Prioritas 2023 pada tanggal 28 Februari 2023, dihadiri oleh 71 Kementerian/ Lembaga



Forum SDI Penyepakatan Data Prioritas 2023





Usulan Data Prioritas 2023

Ditetapkan sebagai Data Prioritas

2404 Data

Tidak Ditetapkan sebagai

Data Prioritas 2023

1957 Data

Kode Referensi/Data Induk/ Klasifikasi

129 Data

Diusulkan menjadi Data Prioritas 2024 karena penyediaannya mengikuti anggaran tahun depan

314 Data

Data Prioritas yang tidak dikonfirmasi oleh K/L pengampu dan tidak memiliki dasar rujukan yang kuat, serta usulan Data Prioritas yang tidak disanggupi penyediaannya oleh K/L pengampu karena tidak termasuk dalam tupoksi

1643 Data









Integrasi Portal Satu Data Indonesia - SPLP



Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Permen PPN No. 17/2020





1. Umum

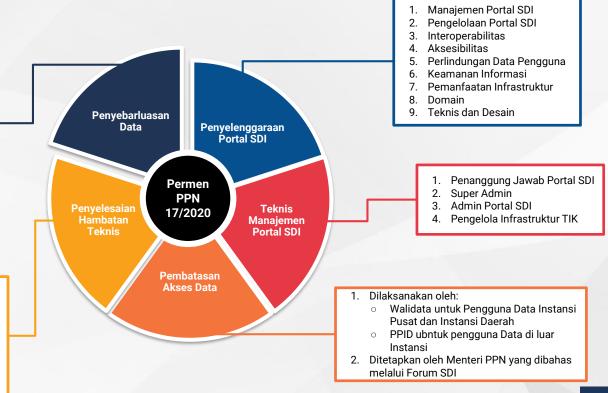
Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip SDI

1. Penyelenggaraan Penyebarluasan Data

- a. Dilakukan oleh **Walidata**
 - b. Penyebarluasan **melalui Portal SDI** dan media
 - c. Portal Data Instansi **wajib terhubung** dengan Portal SDI
 - d. Integrasi Portal Data Instansi dgn Portal SDI dapat difasilitasi oleh Sekretariat SDI
 - e. Sekretariat SDI dapat memfasilitasi pengembangan Portal Data Instansi
 - f. Penyelenggaraan infrastruktur TIK dapat **difasilitasi** oleh Kominfo
 - g. Data dapat disimpan di Portal Data Instansi dgn memperhatikan keterhubungan dgn Portal SDI
- 2. Pengguna Data
 - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah
 - b. Perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum

Dilaksanakan oleh Sekretariat SDI dgn kondisi:

- 1. data rusak atau mengandung kode berbahaya
- 2. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal SDI
- sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
- data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia.



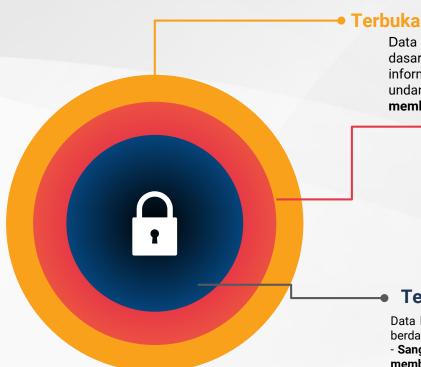




Manajemen Akses Data







Data dapat diakses secara terbuka melalui portal Satu Data, pada dasarnya setiap data dan informasi bersifat terbuka kecuali data dan informasi tertentu yang dibatasi menurut peraturan perundangundangan. Jika fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara

Terbatas

- Vertikal: misal data milik suatu Kabupaten/Kota hanya bisa diakses oleh Kabupaten/Kota tersebut dan Provinsi diatasnya, serta Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian tertentu.
- Horizontal: misal data milik suatu bidang urusan hanya bisa diakses oleh unit kerja bidang urusan tersebut atau organisasi perangkat daerah yang menaungi bidang urusan tersebut

Jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan

Tertutup

Data hanya bisa diakses oleh produsen data terkait, atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua klasifikasi data tertutup;

- Sangat Rahasia : Jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara.
- Rahasia: Jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum yang akan menimbulkan kerugian terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi



Portal Satu Data Indonesia



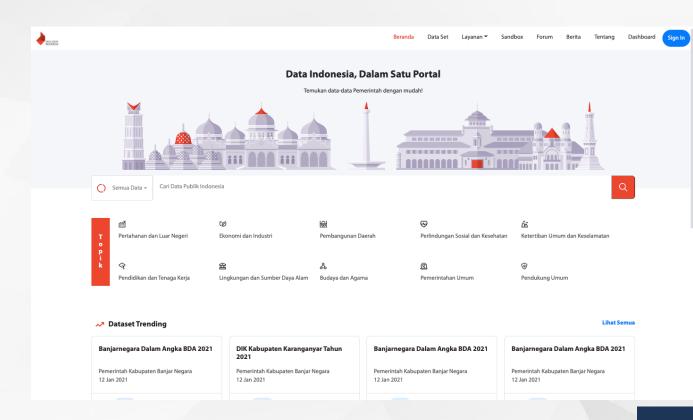


Portal Open Data

Portal yang berisi data yang sudah sesuai dengan Prinsip SDI, dan bersifat terbuka (hak akses ditentukan oleh Wali Data melalui Forum SDI)

Portal Forum SDI

Portal dengan hak akses terbatas, yang memiliki beberapa fasilitas untuk mendukung terciptanya Satu Data (kualitas data, penyelesaian permasalahan data, dan kebijakan terkait data lainnya)







Fitur Portal Satu Data Indonesia







User Instansi K/L/D yang terdaftar



Open Data Forum SDI

Dataset yang bersifat Umum dan dapat diakses oleh Publik



Berita SDI

Berita dan Informasi mengenai Satu Data Indonesia



Open Data Forum SDI

Dataset vana bersifat Umum dan terbatas yang hanya dapat diakses oleh K/L/D

Ahli

Wadah bagi Ahli untuk

bimbingan terhadap topik

dapat memberikan

seputar Forum SDI

Komunitas



Money Kesiapan SDI

Dashboard Monitoring & Evaluasi Kesiapan dan Implementasi SDI di KLD



Daftar Data

Data Katalog dari semua Instansi K / L / D baik data vang bersifat Umum. Terbatas dan Tertutup



Forum

Artikel, Laporan, Peraturan, Juknis dan Dokumentasi lainnya terkait pengadaaan dengan Forum SDI



Permintaan Data

Permintaan terhadap suatu data oleh User Instansi iika tidak menemukan di Daftar Data maupun di Dataset



Bimbingan

Jadwal, Materi, dan Permintaan Bimbingan Teknis terkait dengan Satu Data Indonesia



Analytic

Dashboard Executive untuk para pimpinan dan Analytic tool agar User K/L/D dapat membuat analisis



Login & Logout

User K/L/D dapat login ke Portal SDI dan mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang diberikan



Reset & Change **Password**

User K/L/D dapat melakukan reset dan change password secara mandiri

User Sekretariat SDI



Manajemen User & Hak Akses

Sekrektariat SDI mengelolah dan mengatur User K/L/D dan Hak Akses User terhadap Fitur



Audit & Loa manajemen

Sistem Portal SDI mencatat semua aktifitas yang dilakukan user pada portal SDI



Manaiemen **Konten**

Sekretariat SDI dapat mengatur konten yang ditampilkan ke Publik maupun User K/L/D



Manajemen **API**

Manajemen API untuk integrasi dengan Portal Satu Data Daerah dan Instansi Pusat

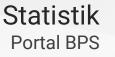


Aliran Data dalam Integrasi SDI





https://analitik.data.go.id/superset/dashboard/107/

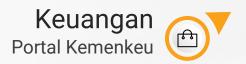








Portal Satu Data Indonesia









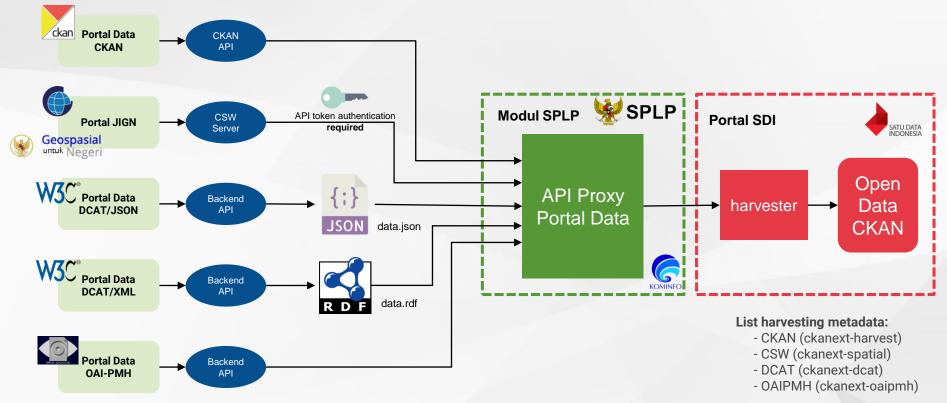
Sektoral KLD
Portal Lainnya
API data.json* (DCAT Catalog Schema)



Aliran Data dalam Integrasi SDI







Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor 4/Juklak/Sesmen/11/2022 tentang Tata Cara Integrasi Portal Satu Data Indonesia

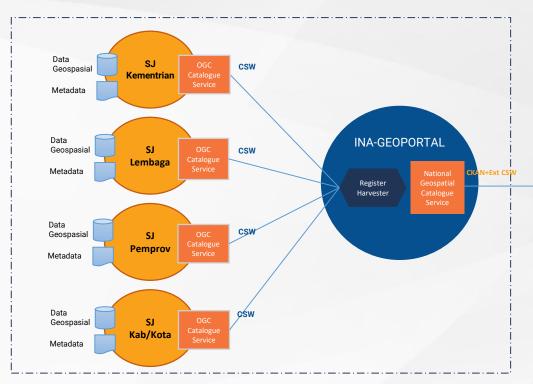


Topologi Integrasi Antara JIGN dengan SDI

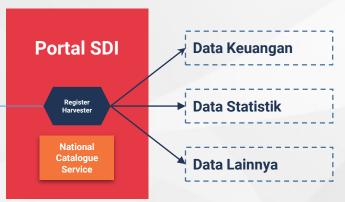




Jaringan Informasi Geospasial Nasional



Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial untuk mengelola jaringan informasi geospasial secara terukur, tertib, terintegrasi, bersama, berdaya guna, dan berkesinambungan. Portal Satu Data Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk menyebarluaskan data sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

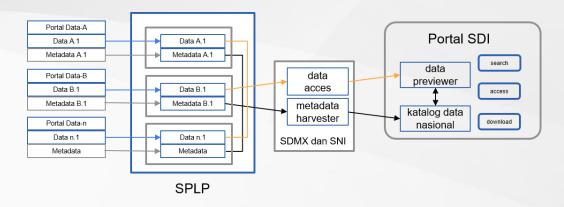




Progres Eksisting Integrasi Melalui SPLP

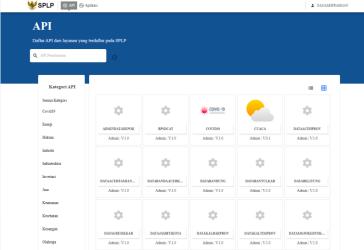






- •Portal Satu Data IPPD berbasiskan CKAN menggunakan CKAN API
- •Portal Satu Data IPPD berbasiskan Selain CKAN menyiapkan API Endpoint berbasiskan data.json dengan DCAT Schema

Integrasi data dilakukan melalui mekanisme SPLP Proxy Service yang terdapat dalam modul SPLP Kementerian Komunikasi dan Informatika.



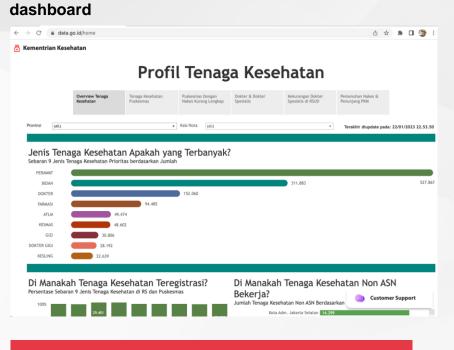


Mekanisme Pengumpulan Data pada Portal SDI





contoh data dan dashboard yang dikumpulkan melalui mekanisme harvesting dan embedding



Data terkumpul dengan cepat namun belum memenuhi Prinsip SDI







Terima Kasih



@data.go.id



@datagoid



data.go.id



+62 822-6000-7040

